



Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Masyarakat Dari Kemiskinan Di Kabupaten Jember

Suprianik¹, Muhammad Ali Akbar Rafsanjani², Mohammad Ali Wafa³, Nuril Fuad⁴

Program Studi Ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

suprianik@uinkhas.ac.id¹, muhammadaliakbarafsanjani@gmail.com², aliwafa240403@gmail.com³, fuad02892@gmail.com⁴

Info Artikel	Abstrak
<p>Masuk: 10 Februari 2024</p> <p>Diterima: 14 Februari 2024</p> <p>Diterbitkan: 18 Februari 2024</p> <p>Kata Kunci: Kemiskinan, Perlindungan Masyarakat, Dinas Sosial,</p>	<p>Kemiskinan adalah salah satu tantangan sosial paling mendesak yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Kabupaten Jember. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan kekurangan pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang memadai. Dalam konteks ini, dinas sosial memegang peranan penting dalam mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan masyarakat yang paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dinas sosial Kabupaten Jember dalam upaya melindungi masyarakat dari kemiskinan, menilai efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan, dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun ada komitmen kuat dari dinas sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan, berbagai hambatan masih menghambat pencapaian tujuan tersebut. Kendala-kendala ini termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang tidak cukup, koordinasi antarlembaga yang kurang efektif, dan kekurangan infrastruktur pendukung. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar upaya peningkatan koordinasi antarlembaga dan alokasi sumber daya yang lebih baik menjadi prioritas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan dan praktik di masa depan</p>

PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab kolektif antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai prioritas nasional, penanganan kemiskinan membutuhkan pemahaman dan dedikasi yang seragam dari seluruh tingkatan pemerintahan. Keceragaman dalam pemahaman dan dedikasi ini diharapkan dapat mempercepat proses penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Di Kabupaten Jember, kemiskinan menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jember pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 236,46 ribu orang. Dibandingkan dengan masalah sosial lainnya, kemiskinan adalah isu yang paling menonjol, yang juga memicu masalah sosial lain seperti pengabaian anak, Penelantaran lansia, odgj serta pengasuhan anak yang tidak efektif.

Kehadiran pemerintah, terutama melalui Dinas Sosial Kabupaten Jember, sangat diperlukan dalam menghadapi isu kemiskinan ini, sesuai dengan mandat dan fungsi yang diemban. Disini Dinas sosial bertanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai program kesejahteraan sosial, termasuk penanganan kemiskinan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, dinas sosial membutuhkan dukungan dalam hal sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur, anggaran dari APBD, serta pengelolaan yang efisien. Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya ini secara adekuat akan menentukan keberhasilan program yang dijalankan, dan sebaliknya.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Lokal, yang kemudian menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat kewajiban bagi daerah untuk mengelola urusan sosial, termasuk kesejahteraan sosial. UU ini dirancang untuk memastikan bahwa layanan pemerintah lebih alih dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam bidang kesejahteraan sosial, ini berarti bahwa individu dengan kebutuhan kesejahteraan sosial dapat menerima bantuan dengan cepat dan efektif. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah mengambil alih beberapa beban dan tugas dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan-tujuan berikut: (1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan publik, (2) mengembangkan demokrasi, (3) mewujudkan keadilan sosial, (4) mencapai pemerataan, (5) memelihara hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah serta antarwilayah dalam kerangka NKRI, (6) mendorong pemberdayaan masyarakat, dan (7) menstimulasi inisiatif dan kreativitas, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat peranan dan fungsi DPRD (See Suradi, 2011).

Pembahasan di atas menyajikan gambaran komprehensif mengenai upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan fokus khusus pada

Kabupaten Jember. Dari uraian tersebut, terlihat adanya kesinambungan dan keterkaitan yang kuat antara berbagai aspek yang dibahas, mulai dari tanggung jawab kolektif dalam penanganan kemiskinan, peranan Dinas Sosial di Kabupaten Jember, hingga dukungan legislatif melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan pendanaan dari pemerintah pusat.

Dalam konteks otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah telah menerima dukungan program dan dana dari pemerintah pusat untuk memerangi kemiskinan. Ini termasuk alokasi dana dan program dari Kementerian Sosial yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun melalui dana dekonsentrasi. Harapannya, dengan dukungan tambahan ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan upaya mereka dalam mengurangi kemiskinan. Namun, peran utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan seharusnya dipegang oleh pemerintah daerah sendiri, yang diharapkan memiliki alokasi anggaran yang lebih substansial untuk tujuan ini.

Dalam konteks ini, peran Dinas Sosial tidak hanya sebagai pelaksana program tetapi juga sebagai koordinator, advokat, dan fasilitator dalam upaya kolektif melawan kemiskinan di Kabupaten Jember. Dengan dukungan kebijakan yang solid dari pemerintah daerah dan pusat, serta komitmen kuat untuk memahami dan mengatasi kebutuhan nyata masyarakat, Dinas Sosial berada di garis depan dalam melindungi masyarakat dari dampak kemiskinan dan membangun fondasi yang kuat untuk kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Menurut Dwiyanto dan kolega (2003), dalam era otonomi daerah, tanggung jawab atas penanganan kemiskinan tidak bisa sepenuhnya dilemparkan ke pemerintah pusat. Artinya, perjuangan melawan kemiskinan telah menjadi masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dengan intervensi yang tepat. Masalah kemiskinan seharusnya menjadi agenda utama di tingkat daerah, memerlukan dedikasi dan komitmen tinggi dari pemerintah daerah dengan dukungan kapasitas yang adekuat untuk menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan sebagai isu kritical yang memerlukan diskusi dan penanganan yang berkesinambungan.

Adapun Pembahasan yang telah disajikan menunjukkan keterkaitan yang erat antara peran Dinas Sosial dalam melindungi masyarakat dari kemiskinan dengan dukungan kebijakan, sumber daya, dan koordinasi antar-lembaga sebagai bagian dari strategi komprehensif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Jember. Ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya secara efektif.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan kerangka kualitatif, berfokus pada Kabupaten Jember. Dalam kajian ini, diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Jember menghadapi sejumlah hambatan dalam usaha pengentasan kemiskinan, suatu tanggung jawab yang secara eksplisit terpikul pada mereka. Di era otonomi daerah, penanganan isu sosial, termasuk kemiskinan, menjadi prioritas yang harus dijalankan. Narasumber dalam penelitian ini mencakup para pekerja sosial dan perwakilan dari instansi terkait di Kabupaten Jember. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara yang terorganisir, analisis dokumen yang mencakup tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, berbagai laporan, dan literatur yang sesuai. Informasi yang telah terkumpul selanjutnya diproses dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemeliharaan anak-anak terlantar yang meliputi penjangkauan, rujukan dan pemantauan ;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten yang meliputi pendataan, pengelolaan fakir miskin cakupan daerah kabupaten, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat ;
3. Pelaksanaan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa atau kelurahan asalnya ;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan perlindungan dan jaminan sosial;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pemerintah Jember yang bertanggung jawab atas masalah kemiskinan di Kabupaten Jember, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan membuat berbagai kebijakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, dinas sosial menggunakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember, yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember.

Dalam bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan terhadap Sosial Lansia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana, dinas sosial melaksanakan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini terlihat pada seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin, yang menjalankan kebijakan pelayanan sosial terhadap fakir miskin dan beberapa program.

A. Peran Dinas Sosial:

Permasalahan sosial di Kota Jember semakin kompleks dan terus berkembang, sehingga Pemda Kota Jember harus memprioritaskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena populasi yang besar dan kompleksitas permasalahan sosial yang terus berkembang. Kepala Dinas Sosial menyatakan bahwa "di Kota Jember ini, jumlah penyandang masalah kebanyakan bukan warga Jember, tetapi kebanyakan adalah sebagai pendatang, seperti penyandang masalah tuna wisma, gepeng, anak jalanan, pemulung, dan WTS, yang banyak menempati atau tinggal di daerah kumuh."

Namun demikian, pemerintah melalui dinas sosial berusaha menangani masalah PMKS dengan berkoordinasi dengan SKPD yang terkait. Dengan demikian, SKPD, khususnya Dinas Sosial, harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemecahan yang teratur, sistematis, dan berkelanjutan diperlukan untuk berbagai masalah sosial tersebut. Untuk mencapai hal ini, Dinas Sosial Kota Sukabumi membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas, sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sarana prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Menurut teori George Edward III, ada empat variabel yang menentukan kebijakan implementasi : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi
- b. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada komunikasi.
- c. Komunikasi adalah indikator keberhasilan sebuah kebijakan.

Kebijakan harus di sampaikan dengan pihak-pihak terkait. Akibatnya, tiga hal diperlukan Dengan kata lain, penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik juga. Pelaksana kebijakan harus dapat memahami kebijakan dengan jelas sehingga tidak membingungkan, dan pelaksanaan kebijakan harus konsisten. Dalam hal ini, peneliti membahas fenomena komunikasi dengan mempertimbangkan transmisi, kejelasan, dan konsistensi, yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

B. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya terdiri dari beberapa komponen, seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas.

- a. Sumber Daya Staf atau Manusia : Staf atau manusia adalah sumber daya penting untuk implementasi. Karena implementasi tidak akan berhasil tanpa dukungan staf yang berkualitas. Akibatnya, untuk melaksanakan layanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin di bawah tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Jember ini, sangat dibutuhkan sumber daya yang kuat di masing-masing bidang. Kepala Dinas, Bidang Penyajian Masalah Kesejahteraan Sosial Lansia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana, Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah sumber daya (staf) yang berfungsi untuk melaksanakan pelayanan sosial fakir miskin.
- b. Sumber Daya Fasilitas: Sumber daya fasilitas merupakan komponen yang tidak kalah penting dengan sumber daya lainnya dalam melaksanakan pelayanan sosial fakir miskin. Sumber daya fasilitas juga merupakan komponen yang sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, transportasi, dan peralatan pembantu akan sangat membantu pelaksanaan kebijakan sumber daya fasilitas yang dimiliki dinas sosial untuk mendukung pelaksanaan pelayanan sosial fakir miskin. Fasilitas yang disebutkan di atas sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini.
- c. Perencanaan jangka panjang untuk kebutuhan bisnis atau organisasi dikenal sebagai sumber daya anggaran. Peneliti telah berusaha untuk mendapatkan atau meminta data langsung dari dinas terkait mengenai data anggaran dalam implementasi sumber daya anggaran pelayanan sosial fakir miskin ini. Namun, peneliti tidak mendapatkan data tersebut, dan hipotesis peneliti tentang data tersebut dirahasiakan sehingga tidak dapat dipublikasikan.

C. Struktur Birokrasi

Fragmentasi dan prosedur kerja ukuran dasar, atau SOP, adalah dua ciri struktur birokrasi, yang merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pelayanan sosial fakir miskin.

- a. Fragmentasi : merupakan pembagian tanggung jawab kebijakan kepada berbagai badan, yang mengharuskan mereka bekerja sama. Pada umumnya, kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan berkurang seiring dengan tingkat koordinasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi dinas sosial Kabupaten Jember membedakan kegiatan pekerjaan antara satu sama lain. Kepala dinas berfungsi sebagai pejabat tertinggi dalam struktur organisasi ini, dengan setiap bagian terhubung langsung ke kepala dinas melalui rantai komando.
- b. Proses Operasi Standar (SOP) : yang tepat adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami untuk digunakan oleh pelaksana.

Dengan adanya SOP, sumber daya pengampu kebijakan akan memiliki kemampuan untuk menjalankannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP, yang akan menghasilkan peningkatan efisiensi kinerja dan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Menurut wawancara dengan Bapak Didik, S.Sos., kepala seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin

D. Disposisi

Keberhasilan penerapan kebijakan ditentukan oleh disposisi. Jika pelaksana memiliki niat yang baik, mereka akan dapat menjalankan kebijakan sesuai keinginan pembuat kebijakan. Seleksi individu dan insentif adalah dua komponen penting dalam disposisi.

- a. Pemilihan Pelaksana: disposisi atau sikap pelaksana akan menghalangi pelaksanaan kebijakan jika pelaksana yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan harus dipilih dan dipekerjakan oleh individu yang melestarikan kebijakan yang dibuat lebih khusus untuk kepentingan warga negara. BKD mempunyai wewenang untuk memilih dan mempekerjakan karyawan untuk posisi di Dinas Sosial Kabupaten Jember.
- b. Insentif : Salah satu cara yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Karena orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, manipulasi insentif oleh para pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi tindakan mereka dengan meningkatkan keuntungan atau biaya tertentu, yang dapat berfungsi sebagai faktor pendorong yang mendorong para pelaksana kebijakan untuk menjalankan perintah dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan sebelumnya.

E. Kedudukan dan tugas pada bidang LINJAMSOS

Kepala Dinas bertanggung jawab atas Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Pada Perlindungan Jaminan Sosial, kebijakan, rencana, penyusunan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ditetapkan

1. Fungsi

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi berikut untuk melaksanakan tugas yang tercantum dalam Pasal 15:

- a. menyusun, melaksanakan, menyiarkan, dan melaporkan program dan rencana kerja di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial.
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- c. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis untuk rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial.
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial, dan jaminan sosial.
- e. Pembentukan norma, standar, prosedur, dan standar serta bimbingan teknis dan pengawasan untuk rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan.

F. Peran Bidang LINJAMSOS

Kemiskinan mempunyai banyak masalah, mulai dari sumbernya sampai kebijakan yang digunakan untuk menyelesaikannya. Kemiskinan di Kota Jember adalah fenomena sosial yang memiliki banyak aspek, termasuk rendahnya tingkat pendapatan, kekurangan layanan kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi, dan ketidakberdayaan. Hal ini menyebabkan orang miskin tinggal di pemukiman tidak layak huni, kesulitan mendapatkan perawatan medis, pendidikan dasar, dan kesempatan kerja untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan dalam lingkup dimensi ekonomi, dan untuk memenuhi kebutuhan sosial, lingkungan, keberdayaan, dan keterlibatan dalam lingkup dimensi non ekonomi. Selain itu, mereka memiliki perspektif dan ukuran mereka sendiri tentang kesejahteraan sosial, sehingga campur tangan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal bertanggung jawab atas kemiskinan dan masalah sosial. Faktor internal termasuk ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menampilkan peran sosial, dan menangani masalah sosial. Faktor-faktor yang datang dari luar termasuk kebijakan publik yang tidak memihak kepada penduduk miskin, pelayanan sosial dasar yang tidak tersedia, hak atas kepemilikan tanah yang tidak dilindungi, lapangan pekerjaan yang terbatas, ketidakadilan sosial, kesenjangan, dan pengaruh pembangunan yang berorientasi kapitalis. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebanyakan orang miskin tidak dapat menikmati makanan yang sehat, tidak dapat membeli pakaian, tinggal di rumah yang tidak layak huni, tidak dapat menjangkau layanan kesehatan, dan kurang terlibat dalam pendidikan. Penanganannya semakin sulit karena penduduk miskin tidak dapat menangani masalah internal dan eksternal.

KESIMPULAN

Bagian Peran Dinas Sosial Kota Jember dalam program kemiskinan belum program penanggulangan kemiskinan terbaik Pemerintah daerah belum mempertimbangkannya sebagai prioritas utama, Hal ini jelas berdampak pada pelaksanaan program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Jember. Peran Dinas Sosial dalam pengurangan kemiskinan ini berdampak pada banyak variabel, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan sumber daya yang diambil dari APBD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian jurnal ini. Terutama, kami berterima kasih kepada:

Saya Sendiri, yang telah meluangkan waktu dan usaha untuk memberikan informasi yang sangat berharga melalui partisipasi aktif mereka dalam survei yang saya lakukan. Tanpa kerjasama dan kesediaan mereka untuk berbagi pengalaman dan pandangan, penelitian ini tidak akan dapat mencapai kedalaman dan kekayaan informasi seperti yang telah kami peroleh.

Bapak Dr. Mf Hidayatullah, S.H.I., M.S.I dan Ibu Supriani, SE., M.Si, yang telah bekerja tanpa lelah dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis data penelitian ini. Kerja keras, dedikasi, dan komitmen mereka terhadap keunggulan akademik telah menjadi tulang punggung dari keberhasilan penelitian ini. Yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang konstruktif sepanjang proses penelitian. Bimbingan mereka telah membentuk pemikiran dan analisis kami dalam merumuskan kesimpulan yang berharga dari penelitian ini.

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas dukungan logistik dan akses yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Kepercayaan dan dukungan institusi ini terhadap penelitian kami sangat kami hargai.

Keluarga dan Teman-teman, dindi yang dengan setia memberikan dukungan moral dan motivasi. Kesabaran, pengertian, dan dorongan mereka telah menjadi sumber kekuatan kami dalam menghadapi tantangan selama proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Suradi, (2011), Usaha Kesejahteraan Sosial di Era Tonomi Daerah, Jakarta: P3KS Press
- Dwiyanto, A., dkk, (2003), Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Ityan Habibi., Dkk, Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan
- Muslim Sabarisman., (2015), Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi. Jakarta Timur Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tugas pokok dan fungsi dinas sosial
- Muslim Sabarisman., (2015), Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi. Jakarta Timur
- tyan Habibi., Dkk, Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan
- wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Jember Ibu Rini Ramayanti S. sos
- Riniwati, H. (2016). Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM. Universitas Brawijaya Press
- Wiyono, B. B. 2007. Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Action Research). Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
- “Profil Kab Jember.Pdf.” Accessed January 31, 2024. <https://snaiaikapd.or.id/hotel/Profil%20Kab%20Jember.pdf>.
- Dindi Nur Safitri. (2024). Tantangan dan peluang Dinas Sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember. Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 3(4). <https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/7441/5766>